

PERAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN WAKATOBI DALAM MENINGKATKAN PARIWISATA

Risky Yandy

Program Studi Ilmu Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
risky19yandy@gmail.com;

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah : untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dalam meningkatkan Pariwisata dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh dinas tersebut dalam upaya meningkatkan pariwisata. Penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam memahami peran dan hambatan Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dalam mengembangkan pariwisata, peneliti menggunakan teori peran dengan mengukur indikator-indikator seperti wewenang, tanggung jawab, kejelasan tujuan, dan cakupan pekerjaan.

Kata kunci: *Peran, Peningkatan, Pariwisata*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan domain pariwisata memegang posisi krusial dalam menyokong prospek ekonomi bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar objek-objek daya tarik turis wisata. Sesuai dengan regulasi legal yaitu undang-undang no. 10 tahun 2009 tentang sektor kepariwisataan, pariwisata merangkum serangkaian aktivitas wisata yang bervariasi, didukung oleh beragam infrastruktur dan layanan yang dipersembahkan oleh warganegara, pelaku bisnis, otoritas pusat, dan otoritas lokal (daerah). Pariwisata menjadi pemacu esensial dalam memperkuat landasan ekonomi suatu negara, melalui dinamika kunjungan pelancong yang menyumbangkan pundi-pundi devisa, bersirat dari tataran internasional hingga domestik. Dalam meniti perkembangannya yang terus bergulir, sektor pariwisata tidak sekadar merambah pada dimensi perluasan semata, melainkan juga mengalami diversifikasi yang kompleks, menjelma bukan hanya sebagai ranah pengembangan untuk industri jasa kreatif, melainkan pula sebagai lahan pertumbuhan ekonomi yang melampaui sektor-sektor ekonomi lainnya di dunia (Sukiman, 2017). Kemudian produk yang dapat di dukung untuk menunjang industri pariwisata dapat di kaitkan dengan sektor lainnya seperti sektor perkebunan, pertanian, industri kreatif dan lainnya. Oleh karena itu pariwisata pada umumnya bersifat multidimensi dan multidisiplin. Indonesia, negara yang memayungi ragam etnik dan kebudayaan, tersebar di penjuru nusantara. Keanekaragaman yang luas mencirikan Indonesia sebagai destinasi yang menjanjikan potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Sebagai Negara kepulauan tentunya Indonesia sangat luar biasa terutama di wilayah pesisir, oleh karena itu Indonesia mempunyai jumlah perairan yang

sangat besar dibandingkan daratannya. Indonesia memiliki keberagaman hayati dan ekosistem laut antaranya yaitu terumbu karang, padang lamun, spesies ikan, rumput laut, dan hutan mangrove. Keunikan dan keindahan yang dimiliki dikawasan laut menjadikan wisata bahari sebagai potensi wisata bahari atau Marine Tourism yang banyak di minati oleh wisatawan domestik ataupun mancanegara. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencariannya yaitu nelayan pariwisata juga dapat membantu perekonomian masyarakat salah satunya membangun daya tarik wisata. Sebuah destinasi wisata adalah wilayah yang menyajikan aura yang memantulkan integritas dan orisinalitas kawasan pedesaan, melibatkan aspek-aspek sosial ekonomi, kebudayaan, adat-istiadat, keseharian, struktur bangunan, dan penataan ruang desa yang memikat, dengan keberadaan elemen yang eksentrik dan potensi signifikan untuk dipolakan sebagai bagian integral dari sektor pariwisata. Sebuah fenomena sosial dan lingkungan senantiasa merajut dinamika pariwisata. Fenomena ini merujuk pada ketidaksempurnaan sejauh mana keberhasilan pariwisata menyentuh dimensi masyarakat. Menurut Sunaryo (2013), perincian elemen-elemen inti dalam sebuah tujuan wisata melibatkan fasilitas akses, daya tarik, layanan pendukung tambahan, infrastruktur pendukung, dan kerangka kelembagaan. Sementara itu, Buhalis (TT) mengidentifikasi 5A, yaitu *attractions* (daya tarik), *amenities* (fasilitas), *accessibility* (aksesibilitas), *available packages* (paket yang tersedia), dan *activity* (kegiatan), serta *acillary services* (layanan pendukung tambahan). Dalam pandangan lain, Zakaria & Suprihardjo (2014) menegaskan bahwa keseluruhan elemen tersajikan pada wisatawan akan membentuk entitas pariwisata. Dalam kaitannya, aspek-aspek tersebut melibatkan atraksi wisata, sistem transportasi, akomodasi, infrastruktur, dan fasilitas pendukung lainnya.

Sulawesi Tenggara, sebuah wilayah administratif di Indonesia, berlokasi di pulau Sulawesi dan pusat pemerintahannya terletak di Kendari. Provinsi ini terdiri dari 17 wilayah pemerintahan, terbagi menjadi 15 kabupaten dan 2 kota. Ada beberapa tempat wisata yang dapat membuat kita terpesona antara lain, Pulau Nombo, Pantai Batu Atas, Pulau Hoga, Pantai Kamli, Pantai Nirwana, Taman Nasional Wakatobi, Benteng Keraton, Pantai Hondue. Sulawesi Tenggara menyimpan sekumpulan pulau-pulau kecil, lebih tepatnya sebanyak 68 lokasi terumbu karang yang telah diidentifikasi sebagai potensial untuk dikembangkan dalam ranah ekowisata bahari. Pemerintah setempat telah mengimplementasikan serangkaian inisiatif pembangunan yang secara signifikan mempermudah para pengunjung dalam mengeksplorasi keberlimpahan yang terdapat di Sulawesi Tenggara. Proyek-proyek pembangunan mencakup berbagai aspek, termasuk infrastruktur yang diperbaharui, destinasi wisata yang ditingkatkan, serta penyempurnaan dalam jaringan konektivitas. Di antara destinasi wisata bahari yang menjanjikan di Indonesia, Wakatobi menjadi salah satu yang patut mendapat perhatian. Denominasi “Wakatobi” merujuk pada kumpulan empat entitas pulau, yaitu pulau Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Sebelumnya, ansambel pulau ini memegang predikat “kepulauan tukang besi”. Secara geografis, Wakatobi ditempatkan di puncak geografis pulau Sulawesi Tenggara. Sebagai suatu wilayah administratif, kabupaten Wakatobi menandai batas sebelah

utaranya dengan kabupaten Buton dan Buton Utara, sementara sebelah timurnya melibatkan perbatasan dengan laut Banda. Di sisi Barat, kabupaten ini berhubungan dengan laut Flores, dan sebelah selatannya menyentuh Kabupaten Buton. Wilayah administratif ini timbul seiring peristiwa pemekaran daripada entitas kabupaten Buton, dipandu oleh ketemtuan hukum UU No. 29 tahun 2003 yang memancu penciptaan kabupaten Wakatobi, Bombana, dan Kolaka. Berlokasi di wilayah Sulawesi Tenggara, Wakatobi menonjol sebagai entitas yang terfokus pada aspek pariwisata dengan kontras yang mencolok dibandingkan dengan entitas pemerintahan lain di wilayah tersebut.

Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2011 menetapkan “rencana induk pembangunan pariwisata nasional” dan Wakatobi mendapat atensi khusus sebagai destinasi utama. Selanjutnya Wakatobi secara resmi diakui sebagai salah satu sepuluh kawasan strategis pariwisata bangsa nasional melalui perpres No. 3 tahun 2016. Langkah ini didorong oleh tujuan untuk menciptakan dampak positif pada ekonomi nasional, meningkatkan penerimaan devisa negara, dan memberdayakan masyarakat lokal. Dalam ranah administratif, Peraturan Pemerintah RI No. 18 tahun 2016 mengenai perangkat daerah mengamanatkan penyelenggaraan Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi berdasarkan kerangka hukum. Pengaturan tersebut kemudian diperinci melalui Perda No. 5 tahun 2016, yang merincikan pendirian serta struktur entitas di wilayah kabupaten Wakatobi. Lebih lanjut, informasi mengenai hal ini ditemukan dalam peraturan bupati Wakatobi No. 36 tahun 2016, yang secara gamblang menjabarkan struktur organisasi, fungsi, posisi, tanggung jawab, dan prosedur operasional yang berlaku bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi. Dinas pariwisata adalah elemen eksekutor administrasi lokal/daerah, dipimpin oleh suatu individu kepala dinas yang terletak di bawah hierarki dan memikul tanggung jawab terhadap bupati sekaligus memegang tanggung jawab untuk menjalankan kewenangan otonomi daerah demi pelaksanaan kewajiban desentralisasi dalam ranah pariwisata. Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, institusi pariwisata mengeksekusi fungsi-fungsi berikut:

- 1) Penyusunan paradigma kebijakan terfokus pada domain pariwisata.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di sektor pariwisata melibatkan penerapan strategi pemasaran pariwisata, perbaikan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan destinasi pariwisata dan industri kreatif, dan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif.
- 3) Eksekusi administratif dan ketaatan dalam penanganan dinas.
- 4) Pelaksanaan penilaian dan penyusunan laporan atas pelaksanaan tugas terkait administrasi pemerintahan dalam sektor pariwisata.
- 5) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan jabatan fungsional.
- 6) Eksekusi tanggung jawab-tanggung jawab tambahan yang diserahkan oleh bupati.

Fungsi mendasar melibatkan delineasi terperinci terhadap lingkup kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing subdivisi di bawah bendera Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi. Sebagai konsekuensinya, peranan inti dan tugas spesifik ini menunjukkan relevansi yang sangat penting terhadap upaya meraih target visi dan misi yang telah ditetapkan dan diakui secara bersama oleh seluruh

elemen tubuh administratif Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi. Seiring dengan itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi bertindak sebagai pijakan resmi dalam menjalankan program dan kegiatan yang memiliki prioritas, dengan menetapkan posisi tugas pokok dan fungsi sebagai landasan operasionalnya. Wakatobi kini giat membangun infrastruktur untuk meningkatkan layanan dan pengalaman wisata. Langkah-langkah termasuk pembangunan industri provinsi (RPIP) dengan fokus pada *masterplan*, konsep desain 3D, dan rencana aksi program, kawasan pemukiman (SPKP), dan perencanaan tata ruang (RTRW).

Berikut sajian data kunjungan pariwisata di Wakatobi mencakup wisatawan domestik dan mancanegara:

Asal Wisatawan	Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Wakatobi (jiwa)	
	2020	2021
Domestik	3.096	9.033
M mancanegara	415	21
Jumlah	3.511	9.054

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi

Meskipun telah melibatkan upaya perencanaan yang signifikan, tingkat popularitas Wakatobi belum mencapai puncak yang diinginkan, justru terlalu jauh dan terlalu kecil dalam pandangan World Bank (2017). Dalam analisis mendalamnya, Wakatobi dianggap sebagai entitas yang terlalu terpencil dan berukuran terlalu kecil untuk menarik perhatian secara global. Bahkan, laporan tersebut dengan tegas menyatakan Raja Ampat dengan segala ketenarannya, menjadi pilihan lebih optimal. Keadaan ini membawa tantangan serius bagi Wakatobi karena kurangnya pemahaman menyeluruh pada potensinya. Sebagai destinasi bahari, Wakatobi bersaing dengan sepuluh daerah pariwisata serupa dan kurang mendapatkan perhatian yang sebanding karena kurangnya popularitas yang diakibatkan ketidakpahaman tersebut. Keelokan/daya tarik pariwisata bersinggungan dengan empat elemen mendasar, meliputi autentisitas, orisinalitas, variabilitasnya, dan keunikannya (Damanik & Weber, 2006). Hal ini tentunya haruslah bersnergi dengan adanya reformasi birokrasi yang harus digencarkan lagi oleh dinas pariwisata Wakatobi, reformasi birokrasi adalah suatu strategi transformasional yang berfokus pada peningkatan keseluruhan kepuasan konsumen. Alatnya adalah optimalisasi pelayanan dengan biaya yang lebih terjangkau, kualitas yang lebih superior, respons yang lebih cepat, tingkat ketepatan yang lebih tinggi, serta inovasi yang sesuai dengan harapan ekspektasi konsumen. Birokrasi, menurut Islamy (2000), harus melibatkan aspek moral selain formal. Wakatobi, meskipun dikenal dengan pesona bawah lautnya, sebenarnya menawarkan daya tarik di atas permukaan yang belum terungkap. Sering kali terdengar opini yang menggemakan tentang keindahan surga bawah laut, namun kontrasnya dengan realitas di permukaan tanah sangat mencolok. Wakatobi, pada hakikatnya, juga menawarkan potensi pariwisata di darat, namun tampaknya kurang diberdayakan secara mendalam dan belum terurai secara terperinci. Merujuk pada konsep Baumgarten (1983), Damanik & Weber (2006),

Harris & Dines (2006), dan Harsana et al. (2018), deskripsi ini menggali nilai-nilai seperti keunikan, keindahan, keragaman, autentisitas, dan orisinalitas.

Berlandaskan uraian di atas, peneliti mengartikulasikan rumusan masalah sebagai berikut; bagaimana peran Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dalam meningkatkan pariwisata dan faktor apa saja yang menjadi penghambat Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dalam meningkatkan pariwisata?

B. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan paradigma penelitian kualitatif dengan memanfaatkan landasan teoritis peran yang tergolong dalam konsep yang dirumuskan oleh Rizzo & Lirtzman dalam (Pratina, 2013). Pendekatan kualitatif digunakan sebagai strategi epistemologi yang menghasilkan data deskriptif, yang dilambangkan dalam entitas linguistik atau verbal dari partisipan, bersama dengan manifestasi perilaku yang dapat diamati secara langsung. Metodologi penelitian yang dianut menerapkan pendekatan deksriptif kualitatif. Pendekatan ini merujuk pada penelitian yang mengamati fenomena yang dihadapi oleh subjek penelitian, dengan fokus yang lebih mendalam pada pemahaman kondisi atau situasi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengeksplorasi peran Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dalam optimasi sektor pariwisata, bersamaan dengan identifikasi kendala yang dihadapi dinas tersebut dalam mencapai peningkatan peristiwa. Terdapat pemanfaatan teori peran yang dikemukakan oleh Rizzo & Lirtzman dalam (Pratina, 2013), dengan empat indikator esensial, yaitu wewenang, tanggung jawab, kejelasan tujuan, dan cakupan pekerjaan. Untuk mendukung penelitian, data dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan metode perolehannya. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber awal atau lokasi yang menjadi objek penelitian. Dalam konteks ini, data tersebut diperoleh melalui proses wawancara yang dilakukan di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk memahami peran Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dalam meningkatkan sektor pariwisata. Data sekunder merujuk pada data tidak langsung yang relevan dengan penelitian, seperti dokumen, literatur, catatan-catatan, publikasi ilmiah, laporan, arsip, dan monografi. Metode akuisisi/pengumpulan data merupakan paradigma penelitian yang mencakup pendekatan interogatif/wawancara, peninjauan visual/observasi, dan kompilasi dokumenter guna menghimpun informasi di lokasi penelitian.

C. HASIL DAN ANALISIS

Dinas pariwisata bertugas melatih, memonitor, memimpin, dan mengevaluasi kebijakan serta operasional pengembangan pariwisata. Kepala Dinas memimpinnya dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Visi Dinas pariwisata Kabupaten Wakatobi yaitu, Menjadi Kabupaten Konservasi Maritim Yang Sentosa, untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Wakatobi maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusia.
- 2) Optimasi kapasitas ekonomi lokal guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang bersifat berkualitas.

- 3) Mengoptimalkan efikasi dalam penyediaan layanan publik.
- 4) Mengoptimalkan fasilitas teknis dan arsitektur fundamental.
- 5) Mengoptimalkan penatakelolaan sumber daya alam dengan pendekatan yang bersifat kontinu dan berkelanjutan.

Fungsi mendasar melibatkan delineasi terperinci terhadap lingkup kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing subdivisi di bawah bendera Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi. Demikianlah, mandat inti dan peran esensial ini muncul sebagai kebijakan taktis yang vital dalam mewujudkan idealisme dan tujuan yang telah didefinisikan serta disetujui bersama oleh seluruh entitas administratif Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi. Dalam upaya melihat peran dan bagaimana hambatan Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dalam meningkatkan Pariwisata dapat diukur menggunakan indikator berikut:

1. **Wewenang.** Wewenang terindikasi melalui ukuran kekuasaan dan kontrol yang dijelaskan dengan strategi proyektif transparan, menjalankan peran Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dalam meningkatkan pariwisata.
2. **Tanggung jawab.** Tanggung jawab dapat mengukur keterkaitan antara komitmen pada janji dan klaim atas hak, tugas, dan kewajiban sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Hal ini memungkinkan penilaian sejauh mana tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dalam meningkatkan sektor pariwisata.
3. **Kejelasan Tujuan.** Kejelasan tujuan memungkinkan penyelidikan tanggung jawab dan arahan yang ditentukan untuk ditekuni, terfokus pada divisi pariwisata di wilayah kabupaten Wakatobi dalam rangka memajukan sektor pariwisata.
4. **Cakupan Pekerjaan.** Cakupan pekerjaan memungkinkan evaluasi tingkat efikasi dan efisiensi dalam dekomposisi elemen-elemen dan entitas yang dianalisis dalam tugas ini, sekaligus meresapi sejauh mana Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi telah memainkan perannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber mengenai indikator wewenang yaitu tentang bagaimana peran Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dalam menjalankan wewenangnya sebagai pembuat kebijakan, penyedia fasilitas pengembangan kepariwisataan, melakukan pemberdayaan, pengembangan destinasi, pemasaran, pengembangan SDM dan kelembagaan, serta pengembangan ekonomi kreatif berjalan cukup efisien dan efektif. Kemudian mengenai Undang-Undang Kepariwisata terdapat empat dimensi yang menjadi peran Dinas Pariwisata yaitu; Destiasi, Pemasaran, Industri dan Kelembagaan. Kemudian dalam menjalankan wewenangnya, Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi selaku pemangku kebijakan harus pandai dalam memilih sikap atau tindakan tertentu untuk melaksanakan tugasnya, tujuan wewenang sendiri yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, mengembangkan kemampuan karyawan, dan mempercepat pengambilan keputusan. Dalam hal efisiensi dan efektivitas Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi sendiri sudah cukup optimal dalam menjalankan wewenangnya hal ini dikarenakan Wakatobi sudah menetapkan pariwisata sebagai leading sector. Dalam menjalankan wewenangnya Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi sendiri menyediakan fasilitas yang dapat digunakan wisatawan, oleh karena itu juga ada dukungan dari skema

pembiayaannya dari kementerian pariwisata melalui alokasi khusus ataupun APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) secara langsung. Hal itu dilakukan untuk membangun fasilitas kuliner, membangun toko cenderamata, di beberapa titik sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan tersebar di beberapa titik di kabupaten Wakatobi dan penempatan fasilitas-fasilitas tersebut berdasarkan potensi inheren yang tersimpan di dalam masing-masing wilayah.

Berikut adalah data tabulasi pengunjung pariwisata, merangkum kedatangan wisatawan dari luar negeri dan domestik:

Asal Wisatawan	Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Wakatobi (jiwa)		
	2020	2021	2022
Domestik	3.096	9.033	10.528
M mancanegara	415	21	810
Jumlah	3.511	9.054	11.338

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi

Berdasarkan hasil wawancara mengenai faktor penghambat ada beberapa yang menjadi fokus Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi, yaitu destinasi. Terkait dengan tata kelola destinasi yang menjadi hambatan yaitu karena membangun tata kelola membutuhkan sinergi antara stakeholder, yang menjadi tantangan untuk Wakatobi itu karena Wakatobi cukup kompleks dari sisi KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) di satu sisi Wakatobi juga sebagai taman nasional yang satu-satunya taman nasional di Indonesia yang tumpang tindih atau seluruh taman nasionalnya sama persis dengan luas kabupaten Wakatobi secara administratif hambatan. Kemudian pada divisi pemasaran, belum adanya pemasaran yang terintegrasi antara stakeholder baik pemerintah maupun swasta. Itu sehingga hambatan Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi masih di sekitar itu, kemudian yang berkaitan dengan adaptasi teknologi atau adaptasi digital terutama pada entitas industri bagaimana membangun pariwisata yang digital dan berbasis pada teknologi, hal itu yang masih menjadi hambatan Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi.

D. PENUTUP

Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dalam upaya meningkatkan pariwisata dapat dikatakan sudah cukup optimal hal ini diukur menggunakan indikator wewenang, tanggung jawab, kejelasan tujuan, cakupan pekerjaan. Dalam hal efisiensi dan efektivitas Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi sendiri sudah cukup baik sebagai pemangku kebijakan dalam menjalankan wewenangnya, hal ini dikarenakan Wakatobi sudah menetapkan pariwisata sebagai *leading sector* (sektor utama). Hal ini dapat dilihat Dalam menjalankan perannya Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi sendiri menyediakan fasilitas yang dapat digunakan wisatawan kemudian membangun fasilitas kuliner, dan membangun toko cenderamata di beberapa titik yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan tersebar di beberapa titik di kabupaten Wakatobi dan penempatan

fasilitas-fasilitas tersebut berdasarkan potensi inheren yang tersimpan di dalam masing-masing wilayah.

Hambatan Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dalam meningkatkan Pariwisata yaitu, yang pertama terkait tata kelola destinasi yang ada di Wakatobi, hal ini dikarenakan Wakatobi terdiri dari empat pulau (Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko) sehingga masing-masing stakeholders sering mengalami miss communication, karenanya diperlukan sinergi yang lebih. Hambatan yang kedua pada divisi pemasaran, belum adanya pemasaran yang terintegrasi antara stakeholders, kemudian yang ketiga berkaitan dengan adaptasi teknologi atau adaptasi digital, terutama pada entitas industri bagaimana membangun pariwisata yang digital dan berbasis pada teknologi.

Dalam upaya meningkatkan Pariwisata pada Kabupaten Wakatobi kedepannya peneliti mencantumkan beberapa saran antara lain:

- 1) Mengacu pada tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan perannya, diharapkan Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi bisa melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan dibidang kepariwisataan khususnya pada masyarakat disekitar wilayah destinasi Under Water. Karena hal ini dapat berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat, dikarenakan wilayah Kabupaten Wakatobi yang presentasi wilayah perairannya lebih besar ketimbang daratan.
- 2) Untuk meminimalisir hambatan, diharapkan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi untuk meningkatkan kemampuan SDM sesuai dengan spesifikasi pekerjaan atau jabatan melalui penyelenggaraan program edukasi dan pelatihan kepada para *stakeholders* dalam upaya meningkatkan Pariwisata Kabupaten Wakatobi.

Berikut saran dan langkah-langkah yang ditujukan penulis kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dalam upaya meningkatkan Pariwisata di Kabupaten Wakatobi, dan meminimalisir hambatan dengan cara meningkatkan SDM. Dengan mengikuti saran dan langkah-langkah diatas, diharapkan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi dapat meningkatkan Pariwisata yang ada di Kabupaten Wakatobi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariana, R. (2016). *IMPLEMENTASI PROGRAM PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN DESTINASI WISATA DI KABUPATEN JOMBANG*. 15(2), 1–23.
- Informasi, D., Humaniora, F., Sosial, I., Kaen, U. K., Nasional, T., Sosial, I., & Kaen, K. (2017). *Ontologi Informasi untuk Pengembangan Pariwisata*. 2, 2014–2016.
- Kebudayaan, D., Kabupaten, D., Primadany, S. R., & Daerah, P. (n.d.). *ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk)*. 1(4), 135–143.
- Nggini, Y. H. (2019). Analisis Swot (Strength, Weaknes, Opportunity, Threats) Terhadap Kebijakan Pengembangan Pariwisata Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 141.

<https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1739>

- Rahmi Setyawati, K. A. S. (2019). PENGEMBANGAN WISATA DI KABUPATEN BURU MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(2), 4–8.
- Shell, A. (2016). *PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara)*. 15(2), 1–23.
- Wang, Y., & Wang, J. H. (2011). *Penelitian Strategi Pengembangan Pariwisata dan Pola Kepulauan Liburan di China : Studi Kasus Pulau Weizhou*. 3317–3320.
- Prasetyo, Putro. 2013. Strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Pengembangan Potensi Objek Wisata Kota tarakan.ejurnal Ilmu Pemerintahan.Volume 1. Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
- Pratina, Anna (2013). Ambiguitas Peran Dan Konflik Peran Sebagai Anteseden Dari Job Insecurity Pada Contingent Worker.Yogyakarta : STIM YKPN
- R. Sutyo Bakir, 2009, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tangerang: Karisma Publishing Group
- Abu Ahmadi (2007). Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta
- Ahmad Riyadi. (2002). Sosiologi. Jakarta: Erlangga
- Arimbi Horoeopetri, Santosa. (2003). Peranan Pembangunan. Jakarta: PT. Binakarsa,
- Abdulsyani. (2007). Sosiologi Teori dan Terapan. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Bagong Suyanto. (2010). Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media Group.
- A.Yoeti, Oka. Dkk. (2006).Pariwisata Budaya Masalah dan Solusinya.PT. Pratnya Paramita.
- Pitana, I G. dan Gayatri, P G. (2005). Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta:Penerbit Andi
- Alim Sumarno.(2012). Penelitian Kausalitas Komparatif. Surabaya: Elearningunesa.
- Iskandar Wiryokusumo. (2011). Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ridwan,Mohamad (2012), Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. PT SOFMEDIA: Medan.
- A.J, Mulyadi. (2012). Kepariwisataan dan Perjalanan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunaryo, Bambang. (2013). Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yoyakarta: Gava Media
- Pitana, I Gde, and I Ketut Surya Diarta. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 selanjutnya Wakatobi ditetapkan sebagai 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi.
- Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keja Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi.